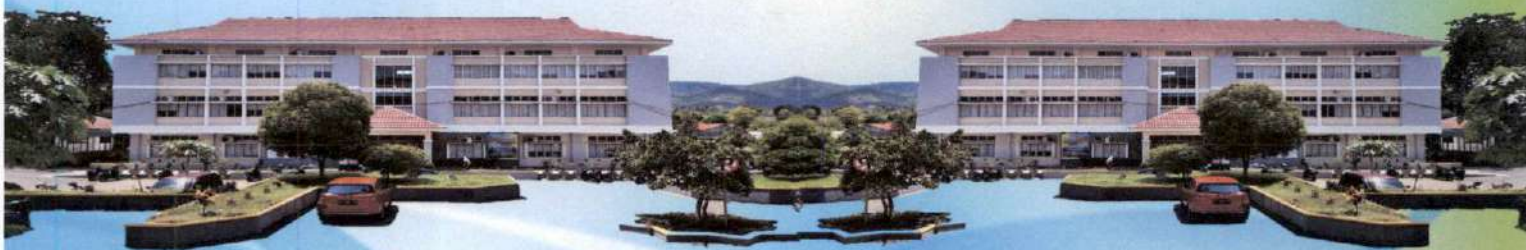




EVALUASI INTERNAL BPKPD

TRIWULAN II

TA. **2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Pemerintah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat disusun.

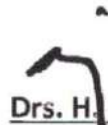
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021, telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Bahan Laporan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi pihak yang berkepentingan..

Watansoppeng, 14 Juli 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Program dan Kegiatan.....	1
B. Faktor-Faktor yang terkait Kinerja.....	12
Bab II. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	14
Bab III. Penutup	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19

BAB I**PENDAHULUAN****A. Program dan Kegiatan**

Adapun dalam pelaksanaannya secara umum kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sudah sesuai target kinerja yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA 2021), baik dilihat dari sisi pengelolaan keuangan bidang pendapatan maupun belanjanya. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan dengan 8 (delapan) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.24.150.382.019,- dapat terealisasi sebesar Rp.8.354.774.230,- atau 34.59% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah yang sesuai regulasi. Jumlah Anggaran Rp.39.360.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.604.450,- atau 42.19% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.7.795.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.544.300,- atau 61.16%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 60.00%.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.12.955.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.372.200,- atau 33.75%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 40.00%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.13.310.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.3.388.600,- atau 25.46%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.7.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.299.350,- atau 72.59%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 60.00%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan. Jumlah Anggaran Rp.15.727.176.519,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.251.844.240,- atau 33.39% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Hasil yang dicapai adalah jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya. Jumlah Anggaran Rp.15.605.873.519,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.215.075.540,- atau 33.42%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, hasil yang dicapai adalah jumlah SPM yang diverifikasi. Jumlah Anggaran Rp.107.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.910.000,- atau 27.74%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.13.463.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.858.700,- atau 50.94%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan sumber daya pengelola retribusi daerah. Jumlah Anggaran Rp.2.054.353,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Objek Retribusi. Jumlah Anggaran Rp.2.054.353,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 30.00%.

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase peningkatan kedisiplinan sumber daya aparatur. Jumlah anggaran Rp.39.200.000,0- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.699.950,- atau 32.40% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen kepegawaian. Jumlah anggaran Rp.39.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.699.950,- atau 32.40%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah anggaran Rp.881.338.970,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.364.009.150,- atau 41.30% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan. Jumlah anggaran sebesar Rp.15.523.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.198.000,- atau 33.48%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket bahan logistik kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp.133.565.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.280.000,- atau 51.12%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, hasil yang dicapai adalah Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan. Jumlah anggaran sebesar Rp.322.182.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.87.323.750,- atau 27.10%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - d. Penyediaan Bahan Material, hasil yang dicapai adalah Jumlah jenis bahan/material yang disediakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.248.699.370,- dengan realisasi anggaran sebesar

- Rp.110.088.000,- atau 44.27%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu, hasil yang dicapai adalah Jumlah tamu yang difasilitasi. Jumlah anggaran sebesar Rp.16.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.150.000,- atau 62.46%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 80.00%.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp.145.118.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.82.969.400,- atau 57.17%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan peralatan dan mesin kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp.270.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.268.774.000,- atau 99.51% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.270.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.268.774.000,- atau 99.51%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah anggaran sebesar Rp.7.041.847.027,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.384.709.965,- atau 33.86% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket pengiriman. Jumlah anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.909.000,- atau 9.09%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hasil yang dicapai adalah Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik. Jumlah anggaran sebesar Rp.6.512.047.027,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.2.204.528.465,- atau 33.85%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.519.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.272.500,- atau 34.49%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 60.00%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Jumlah anggaran sebesar Rp.149.305.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.56.132.475,- atau 37.60% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, hasil yang dicapai adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK. Jumlah anggaran sebesar Rp.117.209.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.558.475,- atau 37.16%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Jumlah anggaran sebesar Rp.12.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.425.000,- atau 28.19%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah unit gedung yang direhab & luas gedung kantor yang dipelihara. Jumlah anggaran sebesar Rp.19.946.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.149.000,- atau 45.87%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 90.00%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.118.683.308.009,- dapat terealisasi sebesar Rp.16.892.242.567,- atau 14.23% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah tepat waktu. Jumlah Anggaran Rp.1.063.670.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.282.005.300,- atau 26.51% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok. Jumlah anggaran Rp.10.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan. Jumlah anggaran Rp.11.115.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.29.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.18.725.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 25.00%.
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.3.875.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.5.255.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan perbup tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.502.375.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.265.084.400,- atau 52.77%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan perbup tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.474.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.920.900,- atau 3.57%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 40.00%.
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, hasil yang dicapai adalah Jumlah standar biaya umum. Jumlah anggaran sebesar Rp.8.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 40.00%.
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah. Jumlah Anggaran sebesar Rp.121.254.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.000.400,- atau 22.27% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen kas daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.15.033.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.599.850,- atau 17.29%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD. Jumlah anggaran sebesar Rp.16.860.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.679.950,- atau 21.83%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD pengelola Dana DAK. Jumlah anggaran sebesar Rp.10.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- atau 22.54%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan. Jumlah anggaran sebesar Rp.23.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- atau 20.61%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, hasil yang dicapai adalah Jumlah berita acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi. Jumlah anggaran sebesar Rp.23.255.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.600.000,- atau 19.78%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota, hasil yang dicapai adalah Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat Waktu. Jumlah anggaran sebesar Rp.32.166.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.920.600,- atau 27.73%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terlaksananya akuntansi dan tersusunnya pelaporan keuangan daerah yang disusun. Jumlah Anggaran sebesar Rp.292.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.64.417.400,- atau 22.01% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan yang akuntabel . Jumlah anggaran sebesar Rp.18.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.748.700,- atau 42.11%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis kabupaten . Jumlah anggaran sebesar Rp.38.925.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.11.624.800,- atau 29.86%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

- c. Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.19.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.099.850,- atau 11.01%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT. Jumlah anggaran sebesar Rp.113.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.894.050,- atau 36.96%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 65.00%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & jumlah rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Jumlah anggaran sebesar Rp.27.480.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.050.000,- atau 3.82%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 80.00%.
- f. Koordinasi, sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pelaksanaan sidang majelis . Jumlah anggaran sebesar Rp.43.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
- g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.17.680.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.

- h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.13.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan kegiatan penunjang urusan. Jumlah Anggaran sebesar Rp.117.205.733.509,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.518.819.467,- atau 14.09% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.112.509.612.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.518.819.467,- atau 14.68%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - b. Pengelolaan Dana Darurat, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana darurat dan mendesak. Jumlah anggaran sebesar Rp.2.113.580.939,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana bagi hasil Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran sebesar Rp.2.582.540.470,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.800.435.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.63.633.200,- atau 7.95% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pencatatan asset yang tepat dan benar. Jumlah Anggaran Rp.800.435.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.63.633.200,- atau 7.95% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Harga, hasil yang dicapai adalah Jumlah buku standarisasi harga satuan barang dan jasa. Jumlah anggaran Rp.56.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.400.000,- atau 2.47%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah titik penjagaan. Jumlah anggaran Rp.336.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.428.600,- atau 11.14%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 60.00%.
- c. Penilaian Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen penilaian asset daerah. Jumlah anggaran Rp.34.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.265.300,- atau 3.64%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 45.00%.
- d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.70.115.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 30.00%.
- e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.302.850.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.539.300,- atau 7.77%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.991.542.523,- dapat terealisasi sebesar Rp.513.004.619,- atau 51.74% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tercapainya target pajak dan retribusi daerah. Jumlah Anggaran

Rp.991.542.523,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.513.004.619,- atau 51.74%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah peraturan perundang-undangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.274.682.523,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.106.000.819,- atau 38.59%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pendampingan wajib pajak dan retribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.69.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.824.400,- atau 34.53%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.368.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.321.262.200,- atau 87.25%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 85.00%.
- d. Penagihan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah persentase jumlah SPPT yang terdistribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.272.035.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.61.167.200,- atau 22.49%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 60.00%.
- e. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.6.850.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
- f. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase capaian target retribusi daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 40.00%.

B. Faktor- Faktor yang terkait Kinerja

a) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
5. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi antara e-Planning, e-Budgeting dan e-Monev
6. Tidak dipungut biaya pelayanan
7. Kesopanan, keramahan, Kecepatan dan Ketepatan jadwal pelayanan
8. Melakukan jemput bola, petugas turun di setiap kecamatan
9. Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas
10. Pencapaian yang baik atas sasaran Kinerja berdasarkan Tupoksi
11. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
12. Pelaksanaan kegiatan lebih awal, agar di akhir tahun data dapat tersaji lebih cepat.

b) Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang besarannya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparatur pemeriksa
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan administrasi,
6. Penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang dan kualifikasi pendidikannya
7. Kurangnya keahlian pegawai,

8. Rendahnya kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah Daerah
9. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan program/kegiatan strategis sehingga pencapaiannya cenderung belum efektif dan akuntabel

BAB II**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran *Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas* dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2021
"Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas"

	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyampaian rencana kerja anggaran OPD, Laporan Keuangan, dan Pelaporan Aset	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Rata-Rata Persentase Pencapaian Sasaran					100%

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran ***Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas*** pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Transparansi pengelolaan keuangan, dalam hal ini penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas yang terbuka dan jujur dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.
- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang merupakan alat untuk menjelaskan kinerja finansial terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.
 - Adanya peraturan daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan yang mengikat dan menjadi acuan bagi masing-masing OPD dalam pengelolaan keuangan
 - Adanya Standar Operating Procedure dalam penyelenggaraan urusan keuangan
 - Ketaatan terhadap mekanisme pertanggungjawaban
- c. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran tepat waktu
Dalam hal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dengan melakukan asistensi kesesuaian RKA OPD dengan Standar Biaya Umum (SBU), Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) dan ketepatan penggunaan rekening belanja dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- d. Laporan Keuangan tepat waktu
Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan daerah sehingga bermanfaat bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam pengambilan kebijakan fiskal dan manjerial Pemerintah, serta sebagai bahan pemeriksaan bagi Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam hal penyusunan Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng berkewajiban untuk menyusun laporan

yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, baik sumber-sumber penerimaan, pungutan pajak maupun pinjaman pemerintah daerah.

Penyampaian Laporan Keuangan (OPD) Tahun 2020 dapat dikatakan Tepat waktu, didukung oleh surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/1972/BPKPD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 Perihal Permintaan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu tercatat bahwa terdapat 34 SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, dinilai dari tanggal penyeteroran Laporan Keuangan yakni per 21 Januari 2020 dan memenuhi nilai akuntabilitas keuangan sebanyak 34 SKPD.

- e. Laporan aset tepat waktu. Dari 34 SKPD tercatat bahwa jumlah SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan akhir Barang Milik Daerah sebanyak 34 SKPD.

Sebagai Badan pengelola Barang Milik Daerah, BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan kinerjanya antara lain :

- Pengamanan fisik Barang Milik Daerah termasuk pengamanan data dan keamanan dari segi hukum (pengsertifikatan)
- Pemanfaatan aset dalam bentuk sewa lahan, ATM, Pinjam Pakai aset (pusat dan daerah).
- Kerjasama infrastruktur KSPI. Peraturan Pelaksanaan kerjasama infrastruktur diatur dalam PMK Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur. KSPI penerapannya dalam bentuk ketersediaan lahan/tanah, sewa infrastruktur transportasi, dan infrastruktur sumber daya air dan pengairan
- Penghapusan dan pemindahtanganan bagi Barang Milik Daerah yang akan dilelang dan dihibahkan. Mekanisme lelang untuk Barang Milik Daerah yang telah dalam kondisi rusak berat melalui lelang terbuka. Sedangkan barang yang telah dihibahkan termaktub dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Monitoring dan evaluasi tertib pencatatan administrasi Barang Milik Daerah setiap OPD, baik Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Persediaan Barang (KPB). Dari

hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tercatat 34 SKPD yang tertib dalam hal pengadministrasian Barang Milik Daerah.

Begitu pula dengan *sasaran meningkatnya efektifitas dan efisensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah* bila dibandingkan dengan target, maka tercapai realisasi dengan persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2021
"Meningkatnya efektifitas dan efisensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah"

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase capaian IKU perangkat daerah	%	100	100	100%
Rata-Rata Persentase Pencapaian Sasaran					100%

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, secara umum rata-rata pencapaian kedua sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100%.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi Internal Triwulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020. Pencapaian Realisasi keuangan Triwulan II sebesar 17,02% dan Realisasi Fisik sebesar 50,05%.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun anggaran 2020 juga terdapat permasalahan yang mengakibatkan realisasi tidak mencapai target. Secara umum hal ini disebabkan karena :

1. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Pemerintah Daerah masih mengandalkan keuangan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
3. Belum mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan
4. Masih banyak pengalokasian dana untuk belanja rutin.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng telah melakukan serangkaian program dan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hambatan/kendala selama pelaksanaannya dapat teratasi dengan baik dan lancar, solusinya antara lain adalah :

1. Sekalipun kekurangan sumber daya merupakan masalah, namun dengan keterbatasan personil yang ada, tetap berusaha untuk dioptimalkan.
2. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung proses pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

4. Membuat Analisis Resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.

Dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 ini harapannya kedepan akan lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian evaluasi internal ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Laporan Evaluasi Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Watansoppeng, 14 Juli 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

Drs. H. DIPA M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	10,550,000.00	0.00	50.00%	5,275,000.00	0.00%	0.00%	1,984,400.00	18.81%		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11,115,000.00	0.00	50.00%	5,557,500.00		0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	29,225,000.00	0.00	50.00%	14,612,500.00		0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18,725,000.00	0.00	50.00%	9,362,500.00	25.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3,875,000.00	0.00	50.00%	1,937,500.00	50.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5,255,000.00	0.00	50.00%	2,627,500.00	50.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	502,375,000.00	0.00	50.00%	251,187,500.00	50.00%	0.17%	265,084,400.00	52.77%		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	474,000,000.00	0.00	50.00%	237,000,000.00	40.00%	0.13%	16,920,900.00	3.57%		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8,550,000.00	0.00	50.00%	4,275,000.00	40.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15,033,000.00	0.00	50.00%	7,516,500.00	50.00%	0.00%	2,599,850.00	17.29%		
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16,860,000.00	0.00	50.00%	8,430,000.00	50.00%	0.01%	3,679,950.00	21.83%		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10,650,000.00	0.00	50.00%	5,325,000.00	50.00%	0.00%	2,400,000.00	22.54%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	23,290,000.00	0.00	50.00%	11,645,000.00	50.00%	0.01%	4,800,000.00	20.61%		
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	23,255,000.00	0.00	50.00%	11,627,500.00	50.00%	0.01%	4,600,000.00	19.78%		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32,166,500.00	0.00	50.00%	16,083,250.00	50.00%	0.01%	8,920,000.00	27.73%		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18,400,000.00	0.00	50.00%	9,200,000.00	50.00%	0.01%	7,748,700.00	42.11%		
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38,925,000.00	0.00	50.00%	19,462,500.00	50.00%	0.01%	11,624,800.00	29.86%		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19,075,000.00	0.00	50.00%	9,537,500.00	50.00%	0.01%	2,099,850.00	11.01%		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113,350,000.00	0.00	50.00%	56,675,000.00	65.00%	0.05%	41,894,050.00	36.96%		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	27,480,000.00	0.00	50.00%	13,740,000.00	80.00%	0.01%	1,050,000.00	3.82%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	43,800,000.00	0.00	50.00%	21,900,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	17,680,000.00	0.00	50.00%	8,840,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	13,940,000.00	0.00	50.00%	6,970,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	#####	0.00	50.00%	#####	50.00%	37.96%	#####	14.44%		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,113,580,939.00	0.00	50.00%	1,056,790,471.00		0.00%	0.00	0.00%		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,582,540,470.00	0.00	50.00%	1,291,270,236.00		0.00%	0.00	0.00%		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	56,650,000.00	0.00	50.00%	28,325,000.00	50.00%	0.02%	1,400,000.00	2.47%		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	436,020,000.00	0.00	50.00%	218,010,000.00	60.00%	0.17%	37,428,600.00	8.58%		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	34,800,000.00	0.00	50.00%	17,400,000.00	45.00%	0.01%	1,265,300.00	3.64%		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70,115,000.00	0.00	50.00%	35,057,500.00	30.00%	0.01%	0.00	0.00%		
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	302,850,000.00	0.00	50.00%	151,425,000.00	50.00%	0.10%	23,539,300.00	7.77%		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	278,482,523.00	0.00	50.00%	139,241,263.00	50.00%	0.09%	106,000,819.00	38.06%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69,875,000.00	0.00	50.00%	34,937,500.00	50.00%	0.02%	23,824,400.00	34.10%		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	369,450,000.00	0.00	50.00%	184,725,000.00	85.00%	0.21%	321,262,200.00	86.96%		
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	279,130,000.00	0.00	66.22%	184,850,000.00	60.00%	0.11%	0.00	0.00%		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	6,850,000.00	0.00	50.00%	3,425,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	4,650,000.00	0.00	50.00%	2,325,000.00	40.00%	0.00%	750,000.00	16.13%		
		150,720,971,196	0	50.05%	75,436,937,670		48.69%	25,652,117,457	17.02%		



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Salotungo No. 3 Telp. (0484) 21066 Watansoppeng 90812

Watansoppeng, 13 Juli 2021

Nomor : 85 /BPKPD/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pertemuan**

Kepada
Yth. - Sekretaris dan Kepala Bidang
- Kasubag Perencanaan bersama staf
di,-

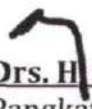
Watansoppeng

Dalam rangka evaluasi internal Triwulan II Tahun 2021 lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 maka diundang Bapak/Ibu untuk mengikuti pertemuan yang in shaa Allah Akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/14 April 2021
Pukul : 10.30 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan BPKPD

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BPKPD
KABUPATEN SOPPENG,


Drs. H. DIPA. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JL. SALOTUNGO NO. 3 TLP. (0484) 21066 WATANSOPPENG

DAFTAR HADIR
BPKPD KABUPATEN SOPPENG

HARI : RABU
TANGGAL : 14/07/2021
WAKTU : 10.00 - SELESAI
TEMPAT : R-RAPAT PIMPINAN BPKPD LT-II

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Nur Umaya	Kasibag Perencanaan	P	
2	Nurdiah. Nur	Kewbij. Umum	P	
3	Erni	Staf	P	
4	Muh Yusup	Staf	L	
5	Anna Lisfani Anis		P	
6	Mannawang	Staf	Laki	
7	Sutra- Meppe-	Staf	P	
8	FERRY IRAWAN	STAF	L	
9	Syajerani Syam	Staf	P	
10	Nukmawati	Staf	P	
11	ROSCENI A-CAHHA		P	
12	A. Asplati	Staf	P	
13	A. Asmy Nurhikmah	Staf	P	
14	Putmitah	-	P	
15	INDARYANI	-	P	
16	Fitrah Nuri M	Staf	P	
17	Najwa Salsabilah-m	Staf -	P	
18	HELVA	"	P	
19	ASHAR	Staf	L	
20	DIANA SARI	"	P	
21	EFA TRISNA	"	P	
22	A-NASRA M.	-	P	

	SYARIFUDIN	Staf	L		Staf
	Muti Ridwan	Staf	L	Staf	
25	Emmuel	-	P		Staf
26	DUMRIANA	-	P		Staf
27	Yunita Sari	-	P	Staf	Staf
28	Piriman mada	-	L		Staf
29	Mastang		P	Staf	
30	Ardiansyah	-	L		Staf
31	MURROPP	-	L		Staf
32	SUHARNI	Staf	P		Staf
33	ABRIALIM	-	L	Staf	
34	YUSUF	-	L		Staf
35	Fahral anza	-	L	Staf	Staf
36	gumalasari	-	P	Staf	
37	Hermiati	Staf	P	Staf	Staf
38	TAHIRAH	-	P	Staf	
39	A-SYAHQUSAL	Staf	L		Staf
40	fatmawati	-	P	Staf	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPRENG



NOTULEN RAPAT

Agenda : Pertemuan dalam rangka evaluasi Internal Triwulan I
Tahun 2021

Hari/Tanggal : Rabu/14 Juli 2021

Waktu Rapat : 08.30 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan

Peserta Rapat : - Sekretaris dan Para Kabid(Mewakili)
-Kasubag Perencanaan bersama staf

Kegiatan Rapat :

I. Kata Pembukaan :

Acara dibuka oleh yang mewakili Sekretaris BPKPD pada pukul 11.00 Wita

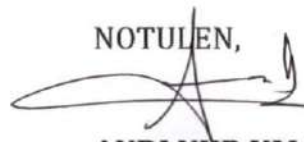
II. Pembahasan :

- Pencapaian realisasi keuangan pada BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan angka 17,02% (sangat Rendah)
- Pencapaian realisasi fisik pada BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan angka 50,05 (Rendah)
- Beberapa kegiatan yang belum terealisasi namun ditargetkan di triwulan II
- Penutup :

Rapat ditutup oleh pada pukul 13.00 Wita

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipedomani dan bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

NOTULEN,



ANDI NUR UMAYA

NIP. 19811006 2009 01 2 008

